

PROFIL DEMOKRASI

Provinsi DKI Jakarta



2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA**

PROFIL DEMOKRASI

Provinsi DKI Jakarta



2019

PROFIL DEMOKRASI PROVINSI DKI JAKARTA 2019

ISBN	: 978-602-0922-46-1
No. Publikasi	: 31520.2007
Katalog Publikasi	: 4601007.31
Ukuran Buku	: B5 (17,6 cm x 25 cm)
Jumlah Halaman	: iv + 30 halaman
Naskah	: Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta
Editor	: Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta
Gambar Kulit	: Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta
Layout	: Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta
Diterbitkan oleh	: ©Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
Dicetak oleh	: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/ atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.

KATA PENGANTAR

Publikasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, berisi data dan informasi yang terkait aspek, variabel, dan indikator IDI Provinsi DKI Jakarta. Publikasi ini merupakan publikasi yang kelima yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan demokrasi yang terjadi di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Data yang disajikan terkait dengan aspek, variabel, indikator, serta perkembangan dan posisi IDI DKI Jakarta terhadap nasional. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau kajian dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan politik di DKI Jakarta.

Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi kebutuhan data statistik terkait demokrasi, baik oleh instansi pemerintah, swasta, kalangan akademisi, para pelaku politik, maupun masyarakat luas.

Jakarta, Oktober 2020

BPS Provinsi DKI
Jakarta Kepala,



BUYUNG AIRLANGGA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan	3
1.3. Manfaat	4
II. METODOLOGI	5
2.1. Metode Pengumpulan Data	7
2.2. Makna dan Nilai IDI	8
2.3. Kerangka Pikir	8
III. PERKEMBANGAN IDI	14
3.1. Perkembangan Indeks Aspek-Aspek IDI	16
3.2. Perkembangan Variabel-Variabel IDI	18
3.3. Perkembangan Indikator IDI	20
3.4. Perkembangan IDI DKI Jakarta dan IDI Nasional	23
3.5. Peraturan daerah Yang Diskriminatif	25
IV. PENUTUP	26
LAMPIRAN 1. 28 INDIKATOR IDI 2019	
LAMPIRAN 2. GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2007 - SEKARANG	
LAMPIRAN 3. INFOGRAFIS IDI 2019	

BAB I

PENDAHULUAN



<https://ijakarta.blog.id>

Jakarta sebagai ibukota negara merupakan barometer dan refleksi dari bangsa Indonesia yang multi etnik, multi agama, multi ras, dan multi golongan dan kepentingan menjadikannya sangat rentan terhadap konflik. Perlu ada upaya *extra-ordinary* untuk menjaga kebhinekaan ini. Menjaga kondusivitas demokrasi adalah salah satu upaya yang diperlukan untuk memastikan pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itulah diperlukan suatu indikator untuk melihat bagaimana perkembangan dan permasalahan demokrasi.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek demokrasi. Ditingkat pusat, IDI merupakan usaha bersama yang melibatkan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan United Nation Development Programme (UNDP).

Sebagaimana provinsi lain di Indonesia, pengukuran demokrasi di DKI telah dilakukan sejak tahun 2009. Aspek demokrasi tersebut adalah kebebasan sipil (*civil liberties*), hak-hak politik (*political rights*), dan lembaga-lembaga demokrasi (*institution of democracy*). Ketiga aspek ini kemudian dijabarkan menjadi 11 variabel dan 28 indikator.

1.1. LATAR BELAKANG

Mengukur perkembangan demokrasi bukan pekerjaan yang mudah karena luasnya pengertian demokrasi, sehingga mencakup sejumlah besar objek. Oleh karena itu perlu dilakukan penentuan komponen-komponen demokrasi yang datanya akan dikumpulkan. Untuk mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi, disusun sebuah indikator yakni IDI.

IDI disusun dalam upaya membangun alat ukur empirik untuk menilai kemajuan capaian demokrasi. Dengan disusunnya indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi di setiap provinsi berdasarkan ketiga aspek yang dipelajari. Disamping itu, indeks perkembangan demokrasi di satu daerah juga dapat dibandingkan dengan daerah lainnya untuk memperoleh gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi di Indonesia.

1.2. TUJUAN

IDI disusun dengan tujuan:

1. Mengukur secara kuantitatif tingkat pelaksanaan demokrasi karena selama ini perkembangan demokrasi hanya diukur secara kualitatif berdasarkan perkiraan yang bersifat subjektif tanpa tolok ukur yang jelas .
2. Mengukur perkembangan demokrasi.
3. Memperoleh gambaran tingkat dan perkembangan demokrasi

1.3. MANFAAT

1. Dapat menunjukkan tingkat dan perkembangan demokrasi di tingkat provinsi.
2. Membantu perencanaan pembangunan di bidang politik pada tingkat provinsi. Data IDI mampu menunjukkan aspek, variabel atau indikator yang tidak/kurang berkembang sebagai penghambat tumbuh kembangnya nilai-nilai demokrasi sehingga perlu mendapat perhatian dan prioritas oleh pemerintah pusat secara umum dan pemerintah daerah secara khusus
3. Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah konkrit berdasar kajian ilmiah untuk memperbaiki kinerja provinsi masing-masing di masa mendatang

BAB II

METODOLOGI

Data IDI mengacu pada tingkat provinsi karena data yang dikumpulkan merupakan data di tingkat provinsi dan bukan tingkat nasional. Kata “Indonesia” dalam IDI mengacu pada rata-rata nilai provinsi di Indonesia. Tentu saja perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi berbeda dari perkembangan demokrasi pada tingkat nasional. IDI pada tingkat nasional harus menggunakan pemerintah pusat di Jakarta dan rakyat Indonesia secara keseluruhan sebagai sumber data, sedangkan IDI yang disusun pada tahap ini menggunakan pemerintah provinsi dan rakyat di provinsi bersangkutan sebagai sumber data. Dalam prosesnya, pengukuran IDI melibatkan pemerintah provinsi, DPRD, LSM, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, akademisi dan pekerja media di masing-masing provinsi.

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan penyusunan IDI secara keseluruhan mencakup dua jenis data yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Pada tahap pertama, data kuantitatif dikumpulkan melalui *review* dan koding surat kabar dan dokumen. Koding surat kabar dilakukan terhadap muatan surat kabar terpilih di ibukota provinsi. Koding dokumen dilakukan terhadap peraturan daerah, surat keputusan, surat edaran dan peraturan daerah lainnya. Pada tahap kedua, data kualitatif dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan Wawancara Mendalam (WM).

FGD dan WM berfungsi sebagai alat untuk melengkapi kekurangan yang berasal dari data kuantitatif. Pada tahap ini orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya dikumpulkan untuk kemudian digali informasi yang terkait dengan indikator yang ada dalam penghitungan IDI.

2.1. METODE PENGUMPULAN DATA

a. *Review Media*

Media yang dimaksud adalah surat kabar, dan untuk itu dipilih salah satu surat kabar dengan oplah terbesar di Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan surat kabar lokal yaitu Harian Pos Kota.

b. *Review Dokumen*

Jenis dokumen yang digunakan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, seperti Surat Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Surat Edaran, Surat Keputusan DPRD dan dokumen-dokumen lainnya (data pemilih, data pelanggaran Pemilu dan sebagainya).

c. *Focus Group Discussion (FGD)*

FGD mempunyai peranan penting dalam upaya meminimalkan bias dari informasi yang dijangar oleh review media dan review dokumen.

Tujuan FGD selain untuk menjangar data kualitatif berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI, juga dimaksudkan untuk (1) mendapatkan informasi titipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif berkaitan dengan indikator IDI yang telah dikumpulkan melalui review media dan dokumen, (2) melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi terhadap indikator IDI, (3) menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui *review media* dan *review dokumen*.

d. Wawancara Mendalam (WM)

Wawancara mendalam digunakan untuk melakukan verifikasi dan pendalaman informasi yang telah diperoleh melalui *review* media, *review* dokumen dan FGD. Oleh karena itu wawancara mendalam bukan sebagai metode utama dalam proses pengumpulan data, tetapi lebih bersifat komplementer karena melengkapi ketiga metode sebelumnya. Dengan demikian, wawancara mendalam dilaksanakan setelah proses FGD dilakukan. Meskipun demikian peran wawancara mendalam ini tidak kalah penting karena sebagai bagian terakhir dalam penjaringan data kualitatif, dan lebih dari itu juga sebagai penyaring dalam mengurangi bias informasi berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI.

Keterkaitan empat metode di atas dapat dijelaskan bahwa dua metode pertama yaitu *review* media dan dokumen berperan sebagai basis utama dalam penjaringan data kuantitatif berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI. Selanjutnya data-data kuantitatif yang telah diverifikasi dan dielaborasi dengan data kualitatif dijarung melalui dua metode berikutnya yaitu FGD dan wawancara mendalam.

2.2. MAKNA DAN NILAI IDI

Rentang nilai IDI adalah antara nilai 0 sampai 100, semakin mendekati angka 100 menunjukkan tingkat pelaksanaan demokrasi semakin baik. Skor kurang dari 60 bermakna kinerja demokrasi buruk, untuk skor antara 60 sampai 80, berarti kinerja demokrasi sedang, selebihnya berarti kinerja demokrasi baik.

2.3. KERANGKA PIKIR

Kerangka pikir Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) memperlihatkan 3 aspek demokrasi, yang mencakup 11 variabel dan 28 indikator. Dengan mempertimbangkan dimensi teoritis dan empiris

tentang demokrasi, maka pada konteks penyusunan IDI, dibentuk 3 aspek utama yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Tabel 1. Komponen Penyusun Indeks Demokrasi Indonesia

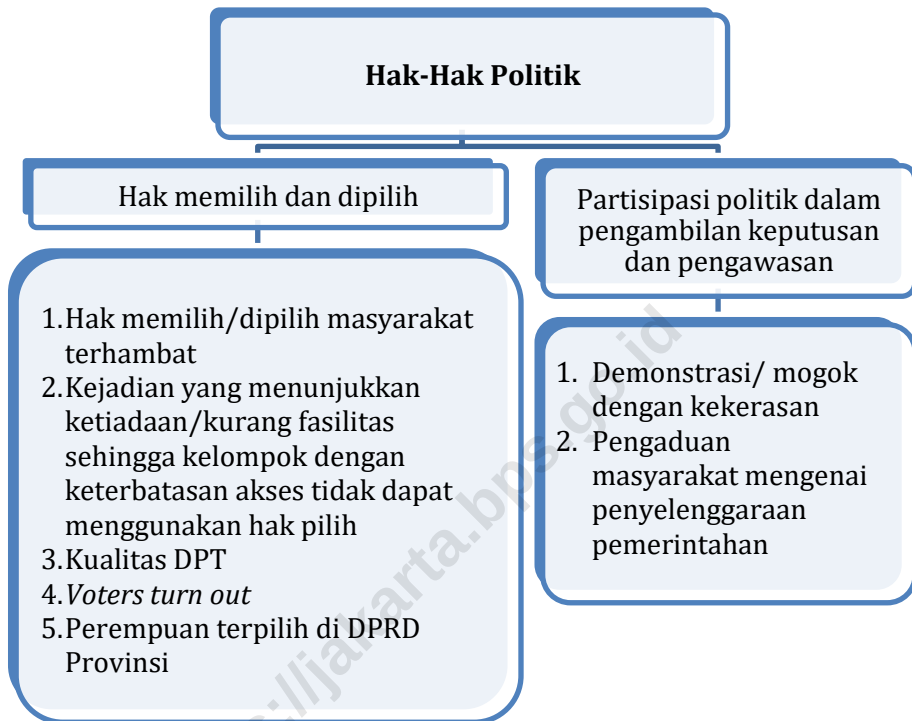
Aspek	Variabel	Indikator
(1)	(2)	(3)
1. Kebebasan Sipil (<i>Civil Liberty</i>)	1. Kebebasan berkumpul dan berserikat	2 indikator
	2. Kebebasan berpendapat	2 indikator
	3. Kebebasan berkeyakinan	3 indikator
	4. Kebebasan dari diskriminasi	3 indikator
2. Hak-hak Politik (<i>Political Rights</i>)	5. Hak memilih dan dipilih	5 indikator
	6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	2 indikator
3. Lembaga Demokrasi (<i>Institution of Democracy</i>)	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	2 indikator
	8. Peran DPRD	3 indikator
	9. Peran Partai Politik	2 indikator
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 indikator
	11. Peradilan yang Independen	2 indikator

Aspek pertama dan kedua merefleksikan esensi utama dari konsep demokrasi. Namun demikian, mengingat dua esensi dasar dari demokrasi tersebut (*civil liberties* dan *political rights*) tidak mungkin dapat bekerja secara maksimal tanpa adanya wadah, struktur dan prosedur pendukung, maka cukup beralasan bila kemudian lembaga demokrasi (*Institution of Democracy*) juga harus diartikulasi sebagai bagian dari aspek penting demokrasi, dan menjadi aspek ketiga dalam penyusunan IDI.

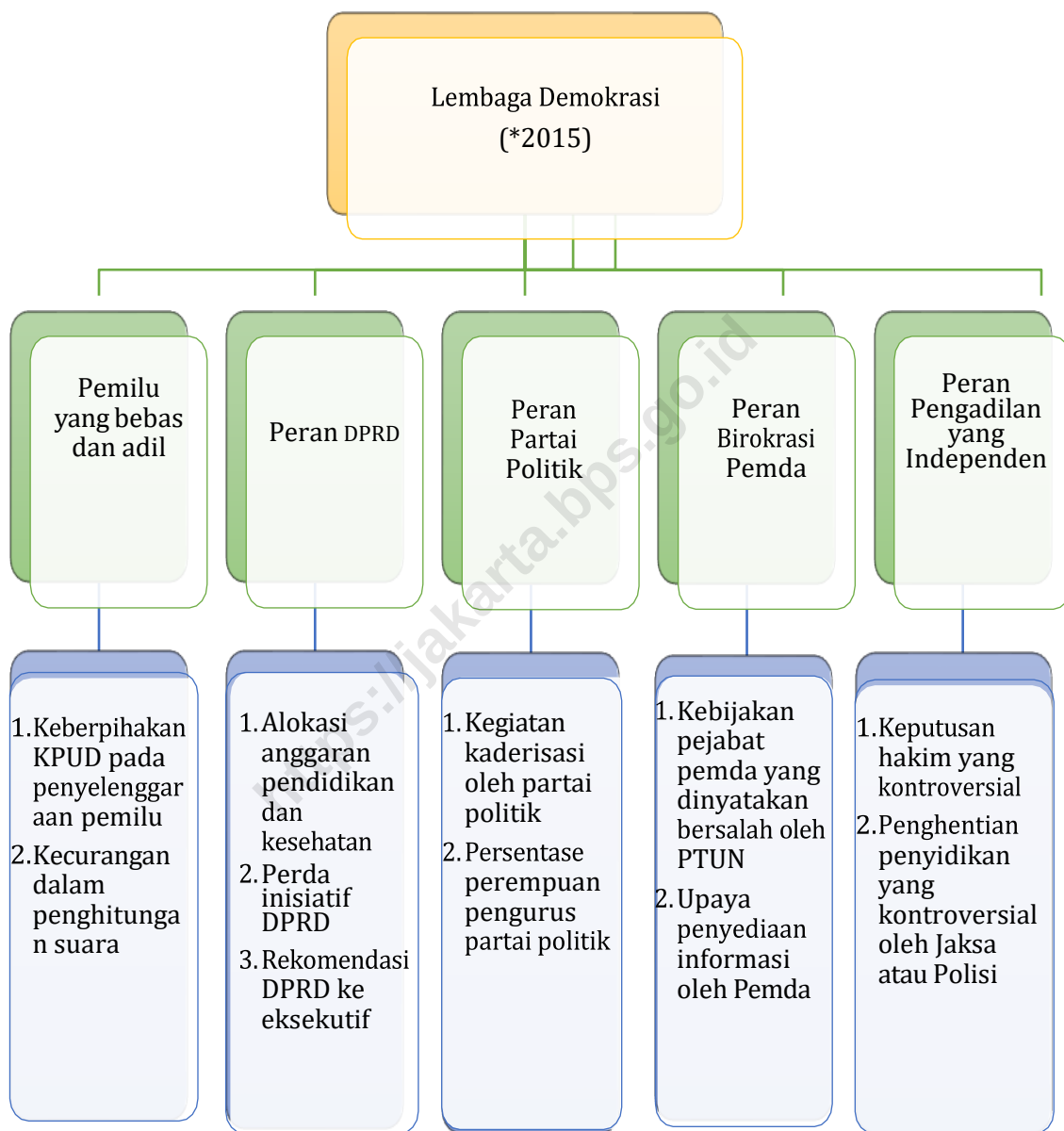
Gambar 1. Aspek Kebebasan Sipil, Variabel, dan Indikator



Gambar 2. Aspek Hak-Hak Politik, Variabel, dan Indikatornya



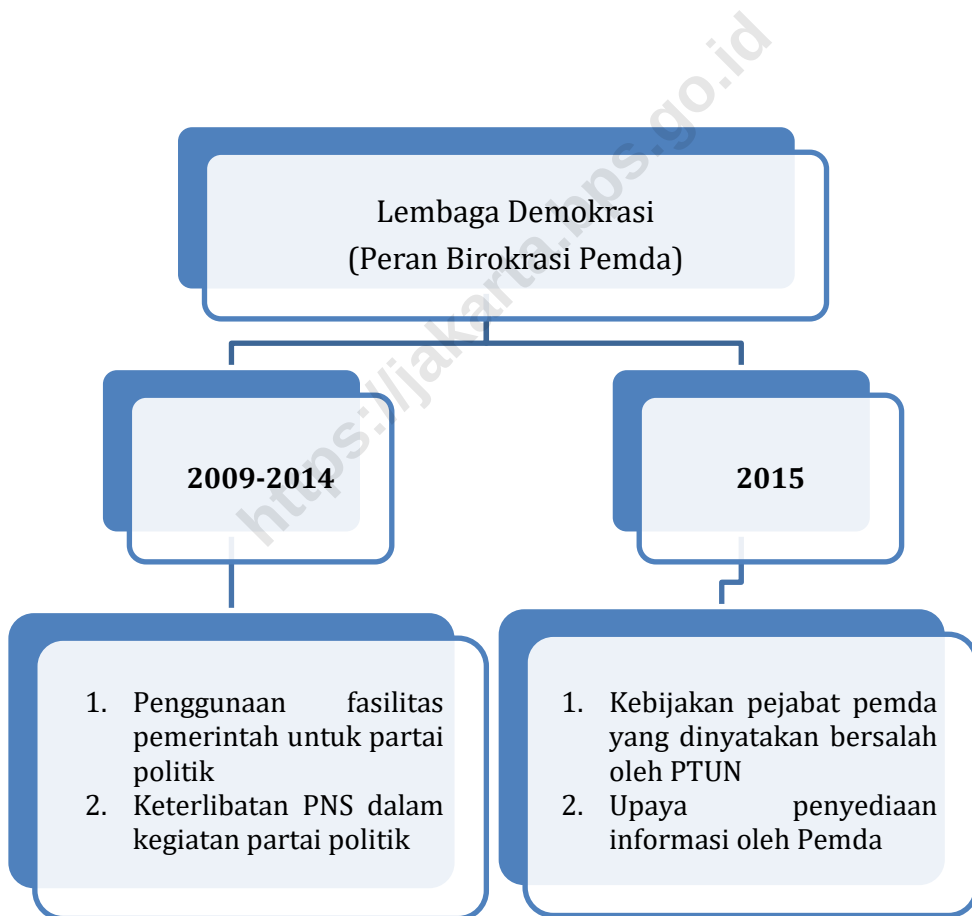
Gambar 3. Aspek Lembaga Demokrasi, Variabel, & Indikatornya



*) Variabel ini diperbarui sejak IDI 2015

Semenjak tahun 2015 untuk variabel 10 Peran Birokrasi Pemerintah Daerah diganti dengan indikator lain yang lebih sesuai, yang dianggap masih dapat mewakili Peran Birokrasi Pemerintah Daerah. Kedua indikator tersebut adalah Kebijakan pejabat Pemda yang dinyatakan bersalah oleh PTUN dan Upaya penyediaan informasi oleh Pemerintah Daerah.

Gambar 4. Perubahan Variabel 10 dan Indikatornya



BAB III

PERKEMBANGAN IDI

<https://ijakarta.ac.id>

Sejak pertama kali IDI dihitung (2009), capaian IDI Provinsi DKI Jakarta cukup berfluktuasi. Dengan besaran mencapai 73,91 pada tahun 2009, angka IDI terus bergerak naik dengan puncak tertinggi pada tahun 2015 yakni sebesar 85,32. Tahun 2016, tepat setahun sebelum Pilkada IDI DKI Jakarta mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 70,85; walaupun pada akhirnya kembali naik secara signifikan juga pada tahun 2017 menjadi 84,73 dan naik kembali pada 2019 menjadi 88,29.

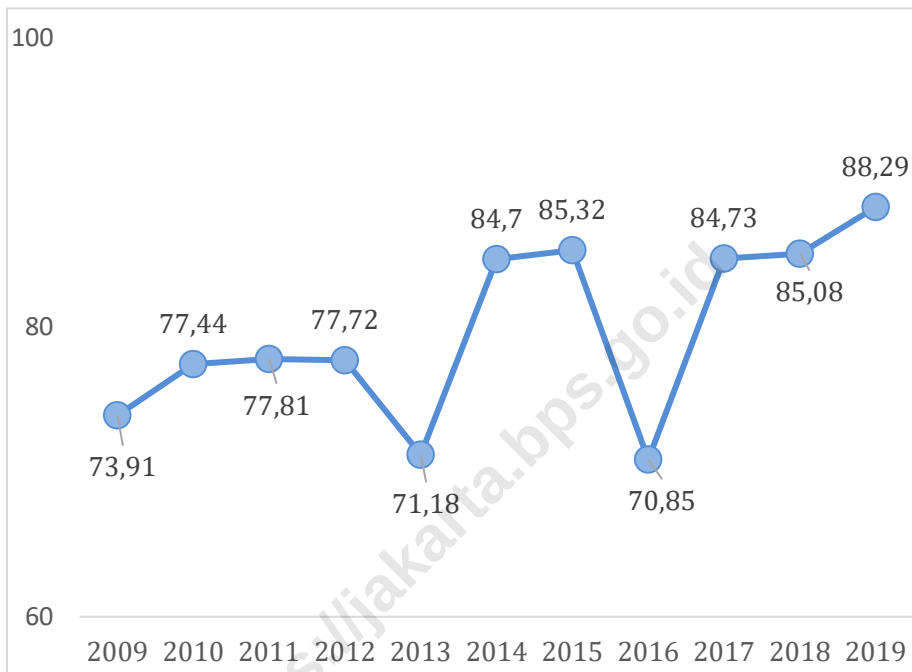
Capaian demokrasi DKI Jakarta selama kurun waktu 2009 - 2013 tetap pada kategori sedang. Ini menunjukkan belum matangnya perilaku dan sikap masyarakat serta pelaku politik dalam berdemokrasi. Pada periode tahun 2014 - 2019 pola capaian IDI cenderung meningkat dan masuk pada kategori baik, kecuali pada tahun 2016.

Pada Tahun 2016 angka IDI berada pada titik terendah selama penghitungan IDI di DKI Jakarta dilakukan, yaitu 70,85. Hal ini dipengaruhi peningkatan suhu politik yang disebabkan pelaksanaan Pilkada DKI 2017. Belum lagi ditambah catatan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang dianggap bersalah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), minimnya laporan kaderisasi Parpol dan rendahnya peran DPRD. Belajar dari peristiwa 2016, sejak tahun 2017 Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan pembenahan.

Selain meningkatnya suhu politik karena *event* Pilgub di DKI Jakarta pada tahun 2016, kebijakan pemerintah provinsi yang dinilai bersalah oleh PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), minimnya laporan kaderisasi parpol dan rendahnya peran DPRD, berimbas kepada IDI tahun 2016 yang kembali turun menjadi 70,85 dan berada pada kondisi demokrasi yang berkategori sedang. Pada Tahun 2017, capaian IDI DKI Jakarta kembali melesat ke kategori baik, dengan skor 84,73 kemudian meningkat lagi pada tahun 2018 dengan skor 85,08 dan pada tahun 2019

mencapai skor tertinggi selama penghitungan IDI dilakukan, menjadi 88,29.

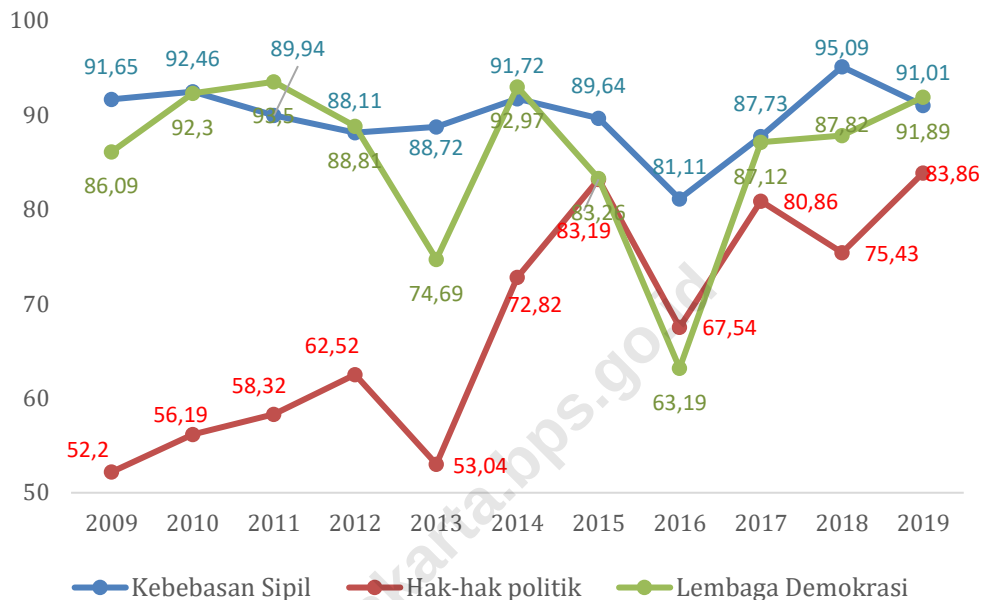
Gambar 5. Perkembangan IDI DKI Jakarta, 2009 -2019



3.1. Perkembangan Indeks Aspek-Aspek IDI

Angka IDI 2019 yang sebesar 88,29 merupakan indeks komposit atau gabungan dari skor 3 aspek IDI yaitu aspek kebebasan sipil dengan nilai 91,01; aspek hak-hak politik 83,86; dan aspek lembaga demokrasi 91,89.

Gambar 5. Perkembangan IDI DKI Jakarta, 2009 -2019



Penurunan Aspek Kebebasan Sipil pada tahun 2019 tidak terlepas dari sengitnya kompetisi pada pemilu 2019, dan maraknya demonstrasi terkait revisi UU KPK dan RUU KUHP. Sengitnya kontestasi berdampak pada persoalan hambatan berkumpul, berserikat, serta berpendapat di masyarakat. Nuansa ini bukan hanya terjadi sebelum pemilu, namun juga setelah pemilu berupa gelombang 2 demonstrasi besar yakni demo terkait penolakan hasil Pemilu di Bawaslu pada Mei 2019 dan demo terkait penolakan revisi UU KPK dan RUU KUHP di Gedung MPR pada September 2019.

Peningkatan Aspek Hak-hak Politik pada tahun 2019 terutama terlihat dengan semakin meningkatnya tingkat partisipasi pemilu dan perbaikan tata kelola fasilitas TPS bagi pemilih disabilitas yang lebih mudah diakses. Pemilihan serentak disinyalir membuat peningkatan *voters*

turnout secara signifikan. Pemilih yang dulunya hanya berminat memilih presiden saja akhirnya juga memilih dalam pemilihan legislatif karena waktunya bersamaan.

Peningkatan Aspek Lembaga demokrasi pada tahun 2019 tidak lepas dari kinerja pemerintah pusat dan daerah, karena indikator pada aspek ini merupakan ranah pemerintah seperti penyediaan informasi APBD oleh pemerintah provinsi, berkurangnya jumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh PTUN, dan menurunnya jumlah laporan terkait kecurangan dalam penghitungan suara.

3.2 Perkembangan Variabel-Variabel IDI

Pada tahun 2019 terdapat empat variabel yang mengalami penurunan indeks, lima variabel yang mengalami peningkatan dan tiga variabel yang tidak berubah.

Untuk variabel yang mengalami penurunan adalah variabel 2 (Kebebasan Berpendapat) turun 63,13 poin dari 83,30 menjadi 20,17, variabel 8 (Peran DPRD) turun sebesar 7,89 poin dari 74,49 menjadi 66,60, variabel 7 (Pemilu Yang Bebas Dan Adil) turun 5,55 poin, dari 97,47 menjadi 91,92 dan variabel 9 (Peran Partai Politik) turun sebesar 0,12 poin dari 100,00 menjadi 99,88 di tahun 2019.

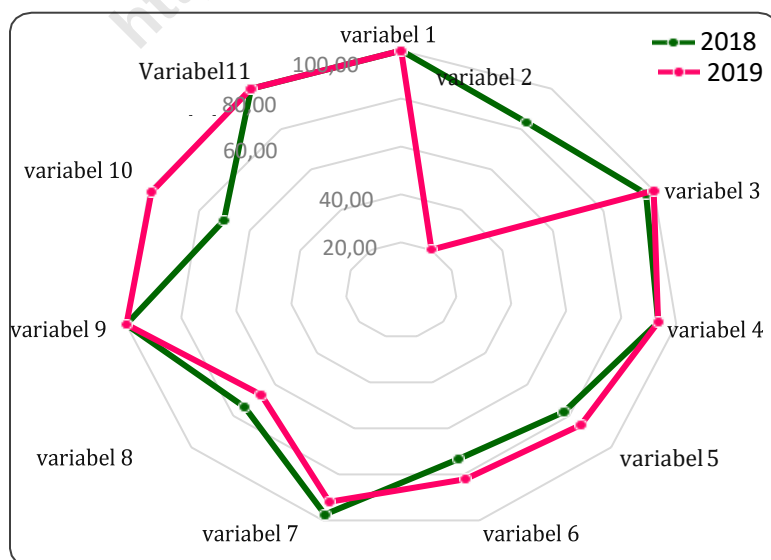
Kenaikan terbesar terjadi pada variable 9 (Peran Birokrasi Pemerintah Daerah) yang naik 28,64 poin, dari 70,16 pada 2018 menjadi 98,80 pada 2019. Variabel 6 (Partisipasi Politik) naik sebesar 8,70 poin dari indeks 73,37 menjadi 82,07. Variabel 5 (Hak Memilih dan Dipilih) naik sebesar 8,18 poin dari indeks 77,48 menjadi 85,66 dan variable 3 (Kebebasan Berkeyakinan) yang naik sebesar 3,08 poin dari indeks 96,92 menjadi 100,00 di tahun 2019.

Hambatan kebebasan berpendapat pada tahun ini sebagian besar disebabkan adanya larangan/pembatasan terhadap demonstrasi dari pemerintah. Kondisi ini yang menyebabkan penurunan skor variabel ini karena memang terjadi beberapa titik sepanjang 2019 yang membuat demonstrasi marak; (1) penetapan hasil pemilu, (2) hasil sidang MK, serta (3) revisi UU KPK dan RUU KUHP.

Penurunan variabel Pemilu Yang Bebas dan Adil diwarnai oleh peningkatan keberpihakan penyelenggara pemilu sekalipun lebih sedikit dibandingkan pada Pemilu Legislatif 2014. Masih adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan melalui beberapa bentuk, seperti *money politics*.

Di sisi lain, ada tiga variabel yang tidak mengalami perubahan yakni Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, Kebebasan dari Diskriminasi dan Peradilan yang Independen. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Perkembangan Variabel IDI, 2018-2019



Keterangan nomor variabel dapat dilihat pada halaman 6

3.3 Perkembangan Indikator IDI

Pada IDI Provinsi DKI Jakarta 2019, dari 28 indikator terdapat 23 yang mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80), meliputi indikator 1, ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat; indikator 2, ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat; indikator 4, ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat; indikator 5, aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya; indikator 6, tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya; indikator 7, ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama; Indikator 8, aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya; indikator 9, tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya; indikator 10, ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya; indikator 11, kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat; indikator 12, ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih; indikator 13, Kualitas Daftar Pemilih Tetap; indikator 14, *Voters turnout*; indikator 17, pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan; indikator 18, kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu; indikator 19, kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam

penghitungan suara; indikator 20, alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap total APBD; indikator 23, kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu; indikator 24, perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi; indikator 25, kebijakan pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN; indikator 26, upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah; indikator 27, keputusan hakim yang kontroversial, dan; indikator 28, penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.

Peningkatan indikator 12 karena ada perbaikan pelayanan pada penyandang disabilitas. Kebijakan tersebut sudah dituangkan pada UU No 7/2017 tentang pemilu serta Peraturan KPU No 15/2018. Pada pasal 19 sudah jelas tercantum bahwa TPS/TPSLN harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas. Demikian juga pada pasal 25 telah terdapat penjelasan detail mengenai teknis penyediaan alat bantu tunanetra saat pemungutan suara (template braile) dan akses untuk penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Capaian ini membuat indikator 12 meningkat.

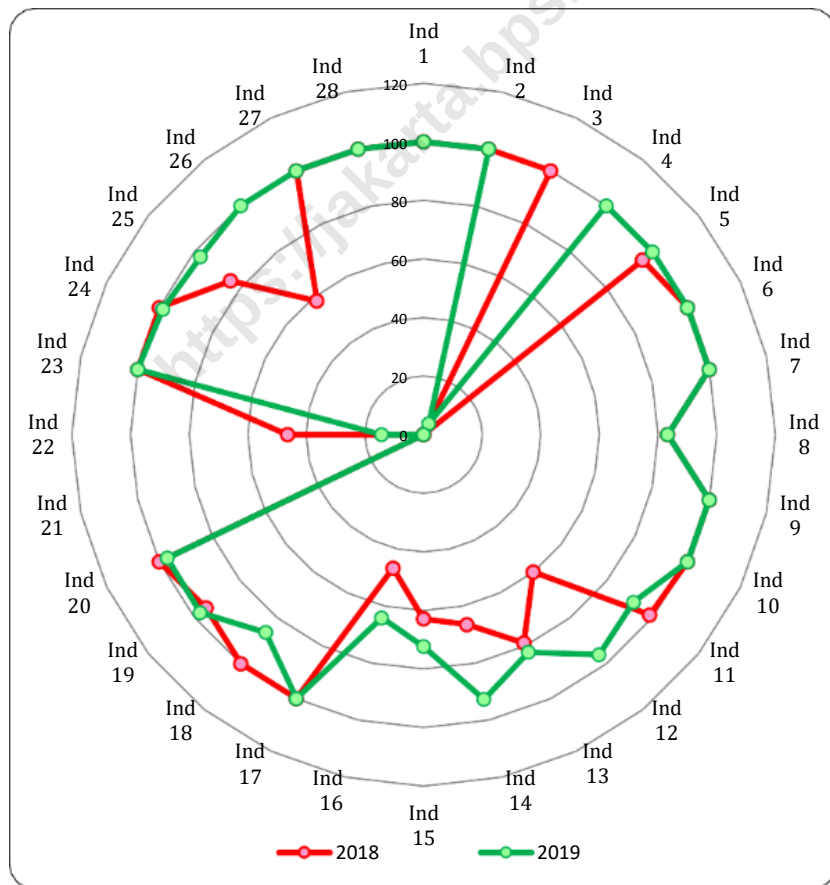
Voters turnout dihitung dari persentase jumlah pengguna hak pilih dibanding jumlah pemilih terdaftar. Pada pemilu 2019 skor *voters turnout* meningkat. Ini disebabkan pemilu serentak, yang membuat orang yang dahulu ingin memilih pileg saja (pilpres golput) dan yang ingin memilih pilpres saja (pileg golput), digabung pada satu waktu pemilihan.

Meski demikian, masih terdapat kinerja indikator demokrasi yang berkategori “buruk” (skor di bawah 60) di tahun 2019. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah: indikator 3, ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat; indikator 21, perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda

yang dihasilkan dan indikator 22, rekomendasi DPRD kepada eksekutif; dan indikator 26, upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.

Penurunan Indikator 3, disebabkan karena adanya pembatasan pada penyampaian pendapat terhadap beberapa wartawan dalam pelaksanaan tugas meliput demonstrasi terkait penolakan hasil Pemilu 2019 di depan Gedung Bawaslu pada bulan Mei 2019 dan demonstrasi terkait penolakan revisi UU KPK dan RUU KUHP di Gedung MPR pada bulan September 2019.

Gambar 8. Perkembangan Indikator IDI 2018-2019

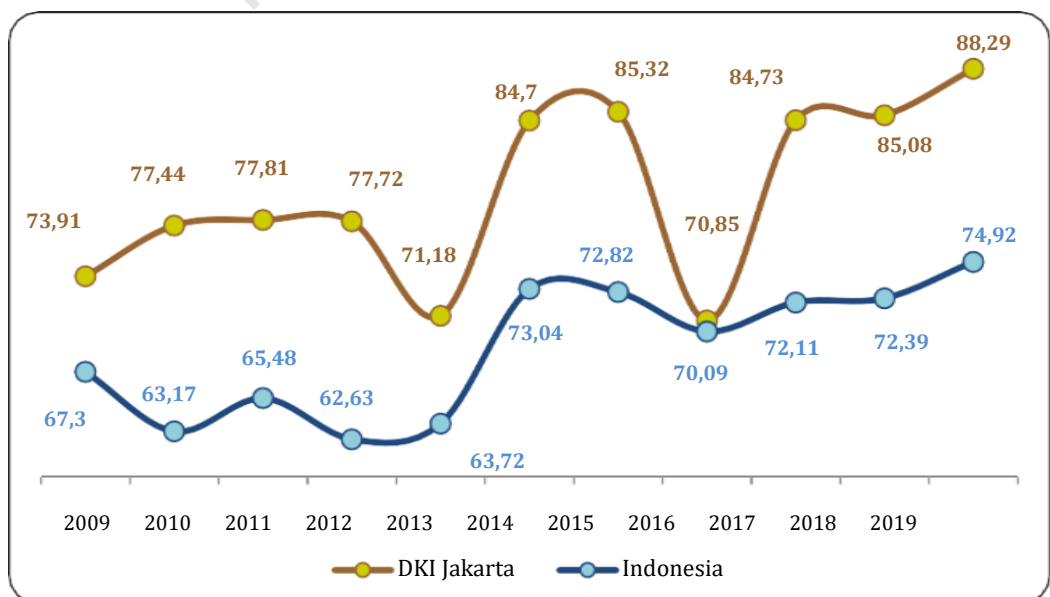


Keterangan nomor indikator dapat dilihat pada Lampiran 1

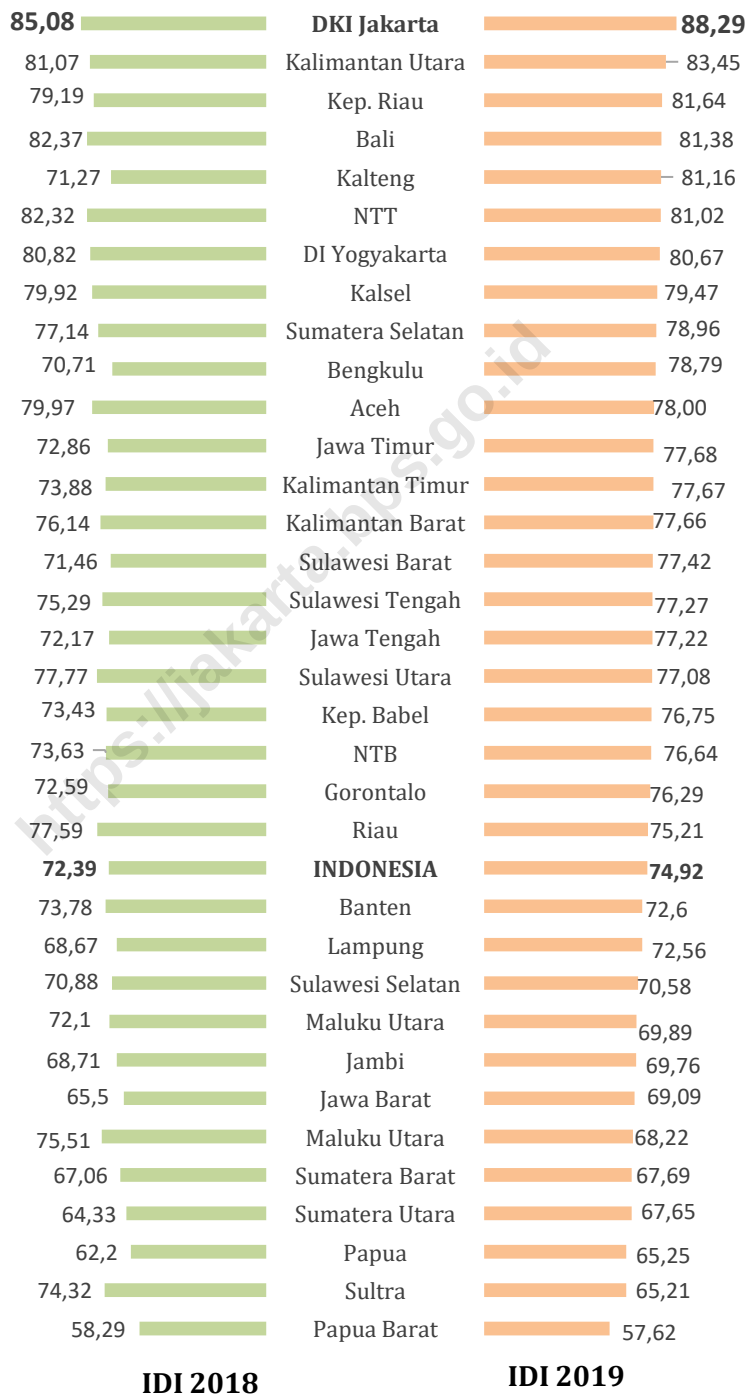
3.4 Perkembangan IDI DKI Jakarta dan Nasional 2009-2019

Apabila dibandingkan angka IDI DKI Jakarta dengan IDI nasional tampak bahwa angka IDI DKI Jakarta sepanjang tahun 2009-2019 lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional. Pada tahun 2009 angka IDI DKI Jakarta sebesar 73,91 lebih tinggi dibandingkan angka IDI nasional yang sebesar 67,3. Angka IDI nasional cenderung berfluktuasi sepanjang tahun 2009-2015. Angka IDI nasional tahun 2014 lebih rendah dibandingkan dengan angka IDI nasional tahun 2013, yaitu masing-masing sebesar 72,82 dan 73,04. Capaian IDI nasional sepanjang tahun 2009-2013 masih berada pada kategori sedang, sementara IDI DKI Jakarta tahun 2014-2015 sudah berkategori baik. Namun pada tahun 2016, IDI DKI Jakarta kembali berkategori sedang, dan kembali ke kategori baik di tahun 2017-2019. Perbedaan angka IDI DKI Jakarta dan IDI nasional disajikan dalam Gambar 9.

Gambar 9. Perkembangan IDI DKI Jakarta dan Nasional, 2009-2019



Gambar 10. IDI 2018-2019 Menurut Provinsi



3.5 Peraturan Daerah yang Diskriminatif

Sejak tahun 2011 terdapat Peraturan Daerah di Provinsi DKI Jakarta yang diskriminatif. Peraturan Daerah Diskriminatif tersebut adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan : Bab I Pasal 1 ayat 14.

Perda ini di Bab I Pasal 1 ayat 4 secara eksplisit membatasi bahwa perempuan adalah manusia yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui. Tim ahli beranggapan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah ini sangat membatasi definisi perempuan sebagai manusia yang dapat hamil, sedangkan ada perempuan yang dari sisi kesehatannya tidak dapat hamil, tidak dapat menyusui anaknya.

Kutipan Perda yang Diskriminatif

“Perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui”

BAB IV

PENUTUP



<https://ijakarta.kids.id>

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah di bidang politik tidak hanya dipengaruhi oleh peran pemerintah semata, tetapi merupakan keberhasilan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan para pelaku politik. Oleh karena itu dalam rangka memajukan keberhasilan pembangunan politik terutama untuk meningkatkan demokrasi di DKI Jakarta dibutuhkan peran aktif dari semua pihak yang terkait. Kinerja masing-masing harus terus ditingkatkan di masa yang akan datang, dan harus terus bersinergi demi tercapainya demokrasi yang lebih baik lagi.

Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan demokrasi juga menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan politik. Melalui kelompok kerja (POKJA) IDI DKI Jakarta diharapkan segala permasalahan dalam pengumpulan data IDI dapat teratasi, sehingga dapat menghasilkan angka Indeks Demokrasi Indonesia yang merepresentasikan kondisi yang sesungguhnya di lapangan.

LAMPIRAN 1: 28 INDIKATOR IDI2019

No	Indikator
1	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
2	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
3	Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
4	Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
6	Tindakan/ Pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
7	Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok
9	Tindakan/ Pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender
HAK-HAK POLITIK	
11	Hak memilih atau dipilih terhambat
12	Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT
14	Voters turnout
15	% Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
LEMBAGA DEMOKRASI	
18	Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu
19	Kecurangan dalam penghitungan suara
20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu
24	Persentase perempuan pengurus partai politik
25	Kebijakan pejabat Pemerintah Daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
26	Kebijakan pejabat Pemerintah Daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
27	Keputusan hakim yang kontroversial
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi

LAMPIRAN 2**GUBERNUR/ WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2007- SEKARANG**

Nama Gub/Wagub	Periode	Partai Pengusung	3 Partai dengan Kursi Terbanyak
Fauzi Bowo/Prijanto	7 Oktober 2007 - 7 Oktober 2012	PDIP, PPP, PD, PDS, PBB, Golkar, PBSO, PPIB, PNU, PBR, PDK, PDI, PKPB	PKS, PDIP, Golkar (2009-2014)
Joko Widodo/Basuki Tjahaja Purnama	15 Oktober 2012 – 16 Oktober 2014	Gerindra, PDIP	PKS, PDIP, Golkar (2009-2014)
Basuki Tjahaja Purnama/-	16 Oktober 2014 – 19 November 2014	Gerindra, PDIP	PDIP, Gerindra, PKS (2014-2019)
Basuki Tjahaja Purnama/Djarot Saiful Hidayat	19 November 2014 – 9 Mei 2017	Gerindra, PDIP	PDIP, Gerindra, PKS (2014-2019)
Djarot Saiful Hidayat/-	9 Mei 2017-15 Oktober 2017	Gerindra, PDIP	PDIP, Gerindra, PKS (2014-2019)
Anies Rasyid Baswedan/Sandiaga Salahudin Uno	16 Oktober 2017- sekarang	Gerindra, PAN, PKS	PDIP, Gerindra, PKS (2014-2019)

LAMPIRAN 3: INFOGRAFIS IDI 2019



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



***BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA***

Jl. Salemba Tengah No 36-38 Jakarta 10440

Telp: (021) 31928493

Homepage: <http://www.Jakarta.bps.go.id>

ISBN 978-602-0922-46-1 (PDF)



9

786020

922461